

PERAN UMKM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Cika Aulia¹, Anabella², Devi Fitriani³, Wahyuni Dwi Febriana Setyaningrum⁴, Saridawati⁵
chikaull64@gmail.com¹, anab4615@gmail.com², deviftrn123@gmail.com³,
wahyunidwifs@gmail.com⁴, saridawati.sti@bsi.ac.id⁵
Universitas Bina Sarana Informatika

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengentasan kemiskinan dan mempromosikan pemerataan pendapatan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, tantangan yang dihadapi UMKM dalam pengembangannya, serta strategi penguatan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Temuan menunjukkan bahwa UMKM merupakan kontributor signifikan terhadap perekonomian nasional, menyediakan peluang kerja dan meningkatkan mata pencaharian. Namun, berbagai tantangan menghambat pertumbuhannya, termasuk akses pembiayaan yang terbatas, pengembangan kapasitas, dan akses pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi komprehensif yang meliputi peningkatan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas manajerial, dan pemanfaatan teknologi untuk perluasan pasar sangat penting. Penguatan UMKM merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: UMKM, Pengentasan Kemiskinan, Pemerataan Pendapatan, Pembangunan Ekonomi, Indonesia.

ABSTRACT

This article aims to explore the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in alleviating poverty and promoting income equality in Indonesia. Utilizing a qualitative approach with a literature study method, the research examines the contributions of MSMEs to job creation and community income, the challenges faced by MSMEs in their development, and strategies for strengthening MSMEs to support inclusive economic growth. The findings reveal that MSMEs are significant contributors to the national economy, providing employment opportunities and enhancing livelihoods. However, various challenges hinder their growth, including limited access to financing, capacity development, and market access. To address these challenges, a comprehensive strategy involving improved financing access, managerial capacity development, and the utilization of technology for market expansion is essential. Strengthening MSMEs is crucial for achieving sustainable economic growth and reducing poverty in Indonesia.

Keywords: MSMEs, Poverty Alleviation, Income Equality, Economic Development, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan masih menjadi masalah serius yang menghambat perkembangan ekonomi secara berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Ketimpangan pendapatan yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin memperparah kondisi ini, sehingga memerlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan terstruktur untuk mengatasi permasalahan tersebut (Naufal et al., 2024). Dalam hal ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi serta sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan pemerataan pendapatan.

UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja. Hal ini menjadikan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di level akar rumput. Bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, UMKM sering kali menjadi jalan utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif (Rizkiyah & Nidar, 2022).

Keberadaan UMKM yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia menjadikannya sebagai motor penggerak utama dalam pemerataan pembangunan. Dengan mendirikan usaha di daerah-daerah pedesaan atau terpencil, UMKM dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi di perkotaan, sehingga pemerataan pendapatan dapat tercapai. Selain itu, UMKM sering kali menggunakan sumber daya lokal dan menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah (Zahra, 2022). Hal ini berdampak pada peningkatan nilai tambah sumber daya lokal yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, sektor UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangannya, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Sebagian besar UMKM masih beroperasi secara informal dengan manajemen yang kurang profesional dan terbatasnya akses modal. Hal ini menyebabkan sulitnya UMKM untuk berkembang lebih besar dan bersaing dengan usaha-usaha yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, keterbatasan teknologi dan inovasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan (Novitasari, 2022). Untuk itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi terkait lainnya agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan berperan lebih signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memperkuat peran UMKM melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Salah satu inisiatif penting adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah kepada UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan modal dari perbankan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program digitalisasi UMKM melalui berbagai pelatihan dan pendampingan agar UMKM dapat lebih mudah beradaptasi dengan era ekonomi digital (Normansyah, 2022). Digitalisasi UMKM diyakini mampu membuka akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Selain aspek pembiayaan dan digitalisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor UMKM juga menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan peran UMKM. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pengelolaan bisnis, hingga pemasaran digital sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM mampu menjalankan usahanya secara lebih efisien dan inovatif (Sinaga et al., 2022). Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu berkolaborasi dalam memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi UMKM, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau, agar mereka memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan sinergi antara UMKM dengan perusahaan besar melalui program kemitraan juga menjadi langkah penting yang dapat mendorong UMKM untuk berkembang. Melalui kemitraan dengan perusahaan besar, UMKM dapat memperoleh bimbingan dan akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kualitas produk mereka.

Dengan demikian, UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan melalui pengembangan UMKM tidak dapat dicapai dalam waktu singkat (DwiKartini et al., 2024). Diperlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk mendukung perkembangan UMKM secara berkelanjutan. Selain itu, perbaikan infrastruktur, regulasi yang lebih mendukung, serta kemudahan dalam berusaha juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang optimal (Awwahah & Iswanaji, 2022). Dalam hal pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial dan ekonomi. Peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan bukan hanya sekedar jargon, tetapi merupakan kenyataan yang dapat tercapai jika didukung dengan strategi yang tepat dan implementasi kebijakan yang efektif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat peran UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di Indonesia secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih holistik mengenai fenomena yang diteliti, serta mendiskusikan berbagai faktor yang memengaruhi peran UMKM dalam hal tersebut (Fitriana et al., 2024). Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam hal penelitian ini, studi literatur mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen pemerintah, serta artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memberikan landasan teoritis yang kuat serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi terkini dan dinamika yang terjadi di sektor UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran UMKM dalam Menciptakan Lapangan Kerja dan Pendapatan Masyarakat

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal perekonomian nasional, UMKM berfungsi sebagai tulang punggung yang tidak hanya memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, tetapi juga berperan dalam menciptakan pendapatan yang signifikan bagi individu dan keluarga. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), sektor UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia, serta mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja di seluruh Indonesia (Pratama et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa sektor UMKM merupakan penyedia lapangan kerja utama yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sektor UMKM di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Di tahun 2021, tercatat ada sekitar 64,2 juta UMKM yang beroperasi di seluruh Indonesia, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan

ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran. Sebuah laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 6,26 juta orang, namun dengan adanya kontribusi UMKM, pengangguran dapat ditekan hingga ke angka yang lebih rendah (Wahab & Mahdiya, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak UMKM yang beroperasi, semakin banyak pula lapangan kerja yang tersedia, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan angka pengangguran di tingkat lokal maupun nasional.

Salah satu keunggulan UMKM adalah kemampuannya untuk beroperasi di berbagai sektor dan daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang terpencil. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan mereka. Misalnya, di daerah pedesaan, UMKM seperti pertanian, kerajinan tangan, dan makanan lokal dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan menemukan pekerjaan (Al Farisi & Fasa, 2022). Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi daerah, UMKM dapat menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sekaligus membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

UMKM juga tidak hanya menciptakan lapangan kerja secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja tidak langsung. Ketika UMKM tumbuh dan berkembang, mereka sering kali membutuhkan layanan tambahan, seperti penyediaan bahan baku, pengiriman, dan distribusi. Hal ini menciptakan peluang kerja bagi individu yang terlibat dalam sektor-sektor tersebut. Misalnya, seorang pengusaha makanan kecil yang berhasil dapat memicu permintaan untuk petani lokal yang menyediakan bahan baku, seperti sayuran dan daging, sehingga menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian (Kadeni, 2020). Dengan demikian, UMKM berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang mampu mempengaruhi lapangan kerja di sektor lain.

Selain menciptakan lapangan kerja, UMKM juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di UMKM dapat digunakan oleh individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang terlibat dalam UMKM mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 25% dalam periode tiga tahun (Rambe et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun, meskipun peran UMKM sangat signifikan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh sektor ini dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap modal. Banyak UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, yang membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya sekitar 19% UMKM yang memiliki akses ke layanan perbankan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang terpaksa meminjam dari sumber informal dengan bunga yang tinggi, yang dapat mengurangi keuntungan yang mereka peroleh.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM yang memiliki keterampilan teknis dalam bidang usaha mereka, tetapi kurang memahami aspek-aspek manajerial dan pemasaran yang penting untuk mengembangkan usaha. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa 56% pelaku UMKM di Indonesia tidak memiliki pelatihan manajemen yang memadai, yang berdampak pada kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha mereka (Ramadhan, 2023).

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor UMKM sangat penting untuk meningkatkan daya saing mereka.

Dalam rangka mendukung peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak terkait harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lembaga pembiayaan mikro (Hermawan et al., 2024). Selain itu, pelatihan dan pendampingan dalam manajemen usaha dan pemasaran juga perlu diperkuat agar pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Indonesia. Sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif dan merata, UMKM memegang peranan kunci dalam mengatasi tantangan pengangguran dan kemiskinan di tanah air. Dalam hal pembangunan ekonomi yang inklusif, dukungan terhadap sektor UMKM harus menjadi prioritas utama untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Tantangan yang Dihadapi UMKM dalam Pengembangan dan Pertumbuhannya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berperan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan dan pertumbuhannya. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat kemampuan UMKM untuk berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian, sehingga perlu ditangani secara serius oleh pemerintah dan pihak terkait. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terhadap pembiayaan (Hermawan et al., 2024). Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hanya sekitar 19% UMKM di Indonesia yang memiliki akses ke layanan perbankan formal. Sebagian besar UMKM mengandalkan sumber pembiayaan dari pinjaman informal dengan bunga tinggi, yang dapat menggerogoti keuntungan usaha. Selain itu, lembaga keuangan formal seringkali menerapkan persyaratan yang ketat dalam pemberian pinjaman, seperti adanya agunan dan rekam jejak kredit yang baik, yang tidak selalu dimiliki oleh pelaku UMKM (Sinuraya, 2020). Akibatnya, banyak UMKM yang terpaksa membatasi ekspansi usaha mereka karena kekurangan dana.

Selain masalah pembiayaan, UMKM juga menghadapi tantangan dalam hal pemasaran produk. Banyak pelaku UMKM yang memiliki produk berkualitas, tetapi tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital dan pemasaran modern membuat produk UMKM sering kali terabaikan. Sebuah studi oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI mencatat bahwa hanya sekitar 30% UMKM yang menggunakan platform digital untuk memasarkan produk mereka (Rapitasari & Soehardi, 2021). Hal ini mengakibatkan potensi pasar yang besar tidak dapat dijangkau, yang berdampak pada penjualan dan pendapatan mereka.

Tantangan lain yang dihadapi UMKM adalah kurangnya kapasitas manajerial. Banyak pelaku UMKM yang memiliki keterampilan teknis dalam bidang usaha mereka, tetapi kurang memahami aspek-aspek manajerial yang penting untuk mengelola bisnis secara efektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Bank, sekitar 56% pelaku UMKM di Indonesia tidak memiliki pelatihan manajemen yang memadai. Ketidakpahaman ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, perencanaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha

(Rahman et al., 2024). Di samping itu, UMKM juga sering menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, infrastruktur yang buruk dapat menghambat distribusi produk dan akses ke pasar. Kondisi jalan yang tidak memadai, kurangnya fasilitas transportasi, dan keterbatasan aksesibilitas lainnya dapat menjadi hambatan bagi UMKM dalam menjangkau konsumen. Hal ini berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan waktu pengiriman, yang dapat mengurangi daya saing produk UMKM di pasar.

Aspek regulasi dan perizinan juga menjadi tantangan signifikan bagi UMKM. Proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang panjang sering kali menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usaha. Hal ini terutama berlaku di daerah-daerah yang memiliki regulasi yang berbeda-beda. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa banyak UMKM yang tidak terdaftar secara resmi karena kendala perizinan, yang mengakibatkan mereka kehilangan akses terhadap berbagai program pemerintah yang seharusnya dapat mendukung pertumbuhan mereka (Rambe et al., 2024). Proses administrasi yang rumit sering kali membuat pelaku UMKM enggan untuk legalisasi usaha mereka, yang pada gilirannya mengurangi potensi mereka untuk berkembang.

Tantangan yang tidak kalah penting adalah persaingan yang semakin ketat. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan akses informasi, UMKM dihadapkan pada persaingan dari berbagai sektor, termasuk perusahaan besar dan produk impor. Dalam banyak kasus, produk yang ditawarkan oleh perusahaan besar memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik dari segi kualitas maupun harga. Selain itu, produk impor sering kali lebih diminati oleh konsumen karena persepsi terhadap kualitas yang lebih baik (Wahab & Mahdiya, 2023). Oleh karena itu, UMKM perlu berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, pelaku UMKM perlu mengadopsi pendekatan yang lebih strategis untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan manajemen, pemasaran, dan teknologi informasi sangat diperlukan untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan peningkatan kapasitas ini, pelaku UMKM akan lebih mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada (Al Farisi & Fasa, 2022). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mempermudah proses perizinan dan akses pembiayaan bagi UMKM. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi operasional bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, sektor swasta dapat memberikan dukungan dalam bentuk investasi dan kemitraan yang berkelanjutan dengan UMKM. Keterlibatan komunitas dalam pengembangan UMKM juga perlu diperkuat. Masyarakat sekitar dapat berperan sebagai konsumen dan pendukung produk lokal, sehingga menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi UMKM. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendukung produk lokal dapat membantu meningkatkan penjualan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

3. Strategi Penguatan UMKM untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Inklusif

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, perlu adanya strategi penguatan yang komprehensif. Penguatan UMKM tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas, akses pasar, inovasi, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Melalui

pendekatan yang terpadu, UMKM dapat berperan lebih aktif dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja (Rapitasari & Soehardi, 2021). Salah satu strategi utama dalam penguatan UMKM adalah peningkatan akses terhadap pembiayaan. Meskipun UMKM memiliki potensi yang besar, akses terhadap modal masih menjadi kendala utama. Menurut data dari Bank Indonesia, sekitar 75% UMKM di Indonesia tidak mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal (Rambe et al., 2024). Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk menciptakan produk pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Misalnya, pengembangan program kredit mikro dengan suku bunga yang terjangkau dan persyaratan yang fleksibel dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Selain pembiayaan, peningkatan kapasitas manajerial dan teknis pelaku UMKM juga menjadi fokus penting. Banyak pelaku UMKM yang memiliki keterampilan teknis tetapi kurang memahami aspek manajerial dalam mengelola usaha. Oleh karena itu, program pelatihan yang menekankan pada manajemen bisnis, pemasaran, dan inovasi produk harus diperkenalkan. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengambil keputusan strategis. Beberapa lembaga dan universitas di Indonesia telah memulai inisiatif ini dengan mengadakan workshop dan pelatihan bagi pelaku UMKM di berbagai daerah (Al Farisi & Fasa, 2022).

Pengembangan akses pasar merupakan strategi lain yang sangat penting bagi penguatan UMKM. Meskipun UMKM seringkali memiliki produk yang berkualitas, mereka sering kali kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran digital dapat menjadi solusi yang efektif. Pemerintah dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan dukungan untuk memfasilitasi UMKM dalam menggunakan platform digital untuk memasarkan produk mereka. Data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia menunjukkan bahwa pasar e-commerce di Indonesia tumbuh pesat, dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 25% per tahun. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, UMKM dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah dan meningkatkan penjualan mereka. Inovasi juga merupakan faktor kunci dalam penguatan UMKM. Di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan di pasar. Inovasi tidak hanya terbatas pada produk, tetapi juga mencakup proses bisnis dan model bisnis. Pemerintah dan lembaga penelitian dapat bekerja sama untuk menyediakan dukungan dalam hal penelitian dan pengembangan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan mendorong UMKM untuk berinovasi, tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penguatan UMKM. Pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti insentif pajak, kemudahan perizinan, dan program-program bantuan teknis. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi dan pengembangan kemitraan dengan UMKM. Misalnya, perusahaan besar dapat menjalin kemitraan dengan UMKM untuk memproduksi barang atau jasa yang saling melengkapi. Hal ini tidak hanya memberikan peluang pasar bagi UMKM, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi mereka. Masyarakat juga dapat berperan sebagai konsumen yang mendukung produk lokal. Kesadaran akan pentingnya membeli produk lokal dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Edukasi masyarakat tentang manfaat produk lokal, baik dari segi kualitas maupun dampak sosial dan lingkungan, sangat penting untuk meningkatkan penjualan UMKM. Program kampanye yang

menekankan nilai-nilai keberlanjutan dan dukungan terhadap ekonomi lokal dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kesadaran ini.

Selain itu, pemerintah dapat menciptakan platform untuk menghubungkan pelaku UMKM dengan konsumen dan mitra bisnis. Pengembangan jaringan yang kuat antara UMKM dan pelaku bisnis lainnya dapat membuka peluang baru untuk kolaborasi dan pertumbuhan. Dalam hal ini, pameran, bazar, dan kegiatan promosi produk lokal dapat diadakan untuk memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat luas. Kegiatan semacam ini tidak hanya memberikan eksposur bagi produk UMKM tetapi juga membantu membangun hubungan antara pelaku usaha.

Tantangan lain yang dihadapi UMKM adalah perubahan regulasi dan kebijakan yang seringkali tidak konsisten. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan regulasi yang jelas dan mendukung bagi UMKM. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengurangan beban pajak, dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Melalui kebijakan yang mendukung, UMKM akan lebih termotivasi untuk berkembang dan berinovasi. Akhirnya, untuk mendukung penguatan UMKM, perlunya pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Pengumpulan data yang akurat mengenai perkembangan UMKM dan dampak kebijakan yang diterapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan penyesuaian strategi. Dengan pendekatan yang berbasis bukti, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengidentifikasi kebijakan yang efektif dan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

KESIMPULAN

UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, UMKM berperan sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk akses pembiayaan, pengembangan kapasitas, dan pemasaran produk. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Strategi tersebut mencakup peningkatan akses terhadap pembiayaan, pengembangan kapasitas manajerial, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pasar. Selain itu, inovasi produk dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan UMKM dapat lebih berdaya saing dan berkontribusi lebih besar dalam upaya mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keberhasilan dalam penguatan UMKM akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian negara secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Awwahah, F. A., & Iswanaji, C. (2022). Peran LAZiS Jateng dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(4), 674–685.
- DwiKartini, B. Y. P., Budiati, A., & Cadith, J. (2024). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Cilegon. *Jurnal Niara*, 16(3), 542–551.
- Fitriana, A., Sofiana, M., Nisa, S. N., Arsibal, S. P., & Khoiriawati, N. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal*

- Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 3(3), 158–168.
- Hermawan, M. F., Salsabila, R., & Saputra, I. M. (2024). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 341–350.
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191–200.
- Naufal, M. J., Surbakti, S., Tampubolon, R. L., Silalahi, R., & Zakiah, W. (2024). Analisis Dampak Pendidikan Dan Akses Keuangan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(1), 91–101.
- Normansyah, N. (2022). Memberdayakan Umkm Dalam Ekonomi Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 379–383.
- Novitasari, A. T. (2022). KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ERA DIGITALISASI MELALUI PERAN PEMERINTAH. *Journal of Applied Business & Economics (JABE)*, 9(2).
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=23564849&AN=164316379&h=FnERMorffidDryuDa7oa65GZaxIy6P8VbFjuuX63Rrdkf6NN6PUSyfgBgU7d9ny1%2Fq%2BILnQftsBQwu6qir2GGQ%3D%3D&crl=c>
- Pratama, E. P. P. A., Choirunnisa, A., Septina, Z., & Setiyawati, M. E. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 570–577.
- Rahman, A. A., Islamiyah, S., Fauzi, Z. A., & Zolana, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha UMKM. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 146–147.
- Ramadhan, Y. M. (2023). Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 1(2), 99–108.
- Rambe, R., Ramadhani, G., & Akmala, T. F. (2024). PERAN UMKM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Musyarti: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(3), 81–90.
- Rapitasari, D., & Soehardi, S. (2021). Strategi Pemberdayaan Umkm Jatim Dalam Menghadapi Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 3(2), 77–87.
- Rizkiyah, T. F., & Nidar, S. R. (2022). Apakah Peningkatan Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Peran Umkm Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan? *IMAGE: Jurnal Riset Manajemen*, 11(1), 1–13.
- Sinaga, I., Purwati, A. S. M., Akadiati, V. A. P., & Ariany, F. (2022). Pemberdayaan UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung dalam pengisian SPT Tahunan. *Near: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 162–167.
- Sinuraya, J. (2020). Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Pros. Semin. Akad. Tah. Ilmu Ekon. Dan Stud. Pembang*, 160. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Nurlinda.pdf>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109–124.
- Zahra, S. (2022). Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM. <https://osf.io/preprints/8qg5z/>.